

Teori Kebenaran Fenomenologis

■ Edy Herry Dwijosudarmo

Dosen Fisip Universitas Airlangga Surabaya

Kurang dijumpainya dialog antara ilmu pengetahuan dan filsafat menjadikan 'filsafat kekurangan darah dan ilmu pengetahuan menjadi angkuh'. Hal ini terjadikarena perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan yang semakin terpecah dalam jalurnya masing-masing.

Meskipun kedua bidang ini pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yakni, pencarian kebenaran pengetahuan manusia, namun dalam perkembangannya masing-masing memperlihatkan kecenderungan yang berbeda.

Di satu pihak, filosof lebih terdorong untuk memberi batas kepada pretensi-pretensi ilmu pengetahuan dan cenderung lebih memberi tempat pada pengetahuan metafisika serta lebih memusatkan perhatiannya kepada 'kepentingan-kepentingan etis, estetis, politis dan religius serta ekspresi dan nasibnya dalam perjalanan sejarah manusia. Sementara di lain pihak,

ilmuwan mencari pembenaran-pembenarannya sendiri dengan menggunakan kriteria kebenaran ilmiahnya sendiri, yaitu dipertanggungjawabkan sejauh mampu diverifikasi atau difalsifikasi melalui prosedur-prosedur ilmiah yang berlaku. Dengan demikian ilmu pengetahuan berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri.

Kesenjangan yang tampak semakin melebar antara filsafat dan ilmu pengetahuan dewasa ini terutama disebabkan oleh perbedaan pendasaran epistemologisnya, yaitu bahwa filsafat cenderung berpijak pada sistem yang logis-deduktif sementara

ilmu pengetahuan lebih bersifat empiris-induktif. Konsekuensi logis dari perbedaan sifat epistemologis ini menjadikan filsafat tetap berciri sebagai pengetahuan normatif yang bersifat spekulatif; sedangkan ilmu pengetahuan lebih bersifat positif, kausal dan deterministik, yang berasumsi bahwa segala gejala bisa dijelaskan melalui metode kuantitatif dengan mengukur dan menghitung.

Sifat di atas begitu mendominasi perkembangan ilmu pengetahuan dewasa ini, sehingga akibatnya tidak hanya ilmu-ilmu kealaman saja, bahkan ilmu-ilmu yang meletakkan manusia sebagai objeknya (ilmu-ilmu sosial dan humaniora) juga mempunyai kecenderungan empiris positivistik. Oleh karena itu sering disebut bahwa sikap 'scientisme' mendominasi kebudayaan intelektual manusia. Jelas bahwa hal ini mengacaukan pengembangan ilmu-ilmu sosial dan humaniora, yakni menurundakan (degradasi) kebenaran yang diperolehnya menjadi tidak sesuai dengan sifat dan hakikat objeknya yang khas manusiawi.

Tetapi dalam kurun waktu yang berjalan, akan selalu muncul orang-orang yang berusaha menggabungkan suatu perhatian filosofis terhadap metodologi ilmu pengetahuan dengan tingkat kompetensi yang diperlukan. Beberapa dari orang-orang tersebut ada yang memiliki keprihatinan dan sudut pandang yang sama dalam meninjau permasalahan dan keyakinan yang sama bahwa dialog antara filsafat dan ilmu pengetahuan bukanlah hal yang mustahil, bahkan suatu keharusan. Orang-orang yang memiliki persamaan dalam beberapa hal tadi tergabung dalam suatu gerakan filsafat yang dikenal dengan *gerakan fenomenologis*.

Sebagai suatu gerakan pemikiran, fenomenologi menjadi masyhur pada

dekade awal dari abad ke-20. Dari Jerman gerakan filsafat ini menjalar ke Perancis dan Amerika Serikat. Sedangkan dalam perkembangannya sampai dengan kurun waktu dewasa ini gerakan fenomenologis telah memberi inspirasi baik dalam bidang pemikiran filosofis (seperti dalam *Eksistensialisme* dan *Neo-Thomisme*) maupun dalam bidang ilmu-ilmu pengetahuan empirik seperti psikologi, sosiologi, antropologi, linguistik dan studi agama.

Para fenomenolog yang tergabung dalam gerakan filsafat ini memiliki keyakinan bersama bahwa dialog antara filsafat dan ilmu pengetahuan memperoleh titik temu dalam epistemologi fenomenologis. Salah satu 'percikan' hasil diskusi para fenomenolog tersebut adalah mengenai sah atau tidaknya kriteria kebenaran yang selama ini menjadi asumsi dasar para filosof dan ilmuwan.

Kriteria Kebenaran : Klasik dan Modern

Sepanjang sejarah filsafat (barat) secara keseluruhan, sekurang-kurangnya ditemukan adanya lima pandangan tentang kebenaran pengetahuan. Dua pandangan pertama meliputi teori-teori tentang kebenaran yang sudah dianggap klasik dalam diskusi filosofis, yaitu teori *Korespondensi* tentang kebenaran dan teori *koherensi* tentang kebenaran.

Tiga pandangan tentang kebenaran lainnya ditemukan dalam sejarah filsafat modern. Ketiganya meliputi teori *pragmatis* tentang kebenaran, teori *performatif* tentang kebenaran (kebenaran yang terlaksana dalam ungkapan manusia) dan teori tentang kebenaran logis yang *berlebihan*.

Berbeda dengan tiga teori kebenaran yang terakhir, ketiga teori kebenaran pertama lebih menekankan perolehan kebenaran pada pihak objek serta cara

yang dilakukan dalam perolehan kebenaran tersebut. Teori kebenaran korespondensi berpendapat bahwa suatu pengetahuan dianggap benar bila terdapat kesesuaian antara *subjek* pengenal dengan realitas (fakta) sebagai *objek* yang dikenal. Teori ini sangat menghargai proses persepsi dan pemeriksaan empiris, yakni bahwa kebenaran suatu hal dibuktikan secara langsung melalui fakta-fakta yang dapat dipersepsi. Cara kerja berdasarkan teori ini bersifat *aposteriori* dengan bertitik pangkal pada dualitas subjek-objek. Dalam rangka perolehan kebenaran tersebut subjek bersifat pasif dan menerima objek sebagai "apa yang dikenal". Jadi ada penekanan yang bersifat lebih pada apa yang dikenal. Dengan demikian pengetahuan yang dianggap benar oleh teori ini adalah pengetahuan indrawi dengan segenap peralatan teknisnya. Pengetahuan yang bersifat indrawi lebih dihargai dibanding pengetahuan akal budi. Teori kebenaran korespondensi ini apabila dilacak berakar pada pemikiran Heraklitos. Sedangkan dalam sejarah filsafat modern muncul dalam pemikiran Bacon, Locke, Berkeley, Hume, dan bermuara pada Comte.

Pandangan kedua, yakni teori kebenaran koherensi berpendapat bahwa pengetahuan dianggap benar bila terdapat keteguhan dan hubungan koheren antara pernyataan satu dengan pernyataan lainnya. Teori ini kurang menghargai sikap empiris dalam cara pendekatan pada isi pengetahuan dan cenderung bertitik pangkal pada si pengenal (subjek) di atas apa yang dikenal. Dalam cara kerjanya, teori ini lebih menggunakan hukum-hukum logika untuk membuktikan kebenaran yang diperolehnya, berdasarkan prinsip bahwa suatu pengetahuan (dalam pernyataan-pernyataan) dianggap benar bila di dalamnya memiliki hubungan logis. Teori

kebenaran koherensi ini berakar dalam pemikiran Parmenides dan ditemukan pula pada pemikiran Pascal, Spinoza, Fichte dan akhirnya bermuara pada Hegel.

Tiga pandangan tentang kebenaran yang lain dan muncul khususnya dalam sejarah filsafat modern, berturut-turut adalah: pertama, teori kebenaran pragmatik dengan tokoh-tokohnya Charles S. Pierce, William James dan John Dewey. Menurut mereka kebenaran pengetahuan hanya terwujud dalam praktek ilmu, yaitu bila ilmu tersebut memiliki manfaat dan konsekuensi praktis dalam kehidupan konkret si pengenal. Karena senantiasa terikat pada fungsi praktis, maka kriteria kebenarannya terlepas dari akal yang mengenal, sehingga kebenarannya lalu bersifat *in-absolut*. Kedua, teori kebenaran yang terlaksana dalam ungkapan manusia (*performative theory of truth*) yang terutama terdapat dalam pemikiran Frank P. Ramsey, John L. Austin dan Peter Strawson, yang dimaksudkan untuk menentang pendapat klasik bahwa kriteria 'benar' atau 'salah' hanya memiliki fungsi untuk menunjukkan apakah suatu pernyataan memiliki arti atau tidak sama sekali. Suatu pernyataan akan berarti dan dianggap benar manakala pernyataan itu menunjukkan makna yang sesungguhnya. Dalam hal ini kebenaran lalu mengalami distorsi makna dan diidentikkan dengan "ketepatan", dengan demikian kebenaran pengetahuan hanya diciptakan oleh ungkapan-ungkapan tertentu tentang isi pengetahuan itu semata. Sedangkan teori yang ketiga, adalah tentang teori kebenaran logis yang berlebihan (*logical superfluity of truth*). Teori kurang populer ini menyandarkan pemahamannya kepada pendapat bahwa kebenaran hanya merupakan suatu kecacauan bahasa saja dan hal ini merupakan pemborosan, karena pada dasarnya apa

yang hendak dibuktikan sebagai suatu yang bernilai benar (dari sudut pernyataan tertentu) memiliki derajat yang logis yang sama yang masing-masing saling melingkupi. Hal itu berarti bahwa setiap pernyataan memiliki isi yang sama, memberikan informasi yang disepakati oleh orang-orang secara bersama, yang sesungguhnya tidak perlu dibuktikan lagi. Seandainya kebenarannya hendak dibuktikan, maka hal ini hanya merupakan bentuk logis yang berlebihan.

Kelima teori kebenaran di atas semuanya mengandaikan adanya dualistik subjek-objek, yakni memandang bahwa subjek dapat dipisahkan secara tegas dengan obyeknya sehingga dalam penentuan kriteria kebenarannya cenderung berat sebelah sebab menekankan salah satu dari aspek tersebut. *Dalam kurun waktu yang berjalan melalui dinantikan sejarah pemikiran yang panjang*. Dalam rangka pencarian kriteria kebenaran yang "sesungguhnya", akhirnya tampilah fenomenologi yang hendak mengembalikan makna kebenaran dan kriterianya kepada kehidupan alamiah manusia yang mengandaikan adanya kesatuan antara subyek yang dikenal dengan didasari oleh intensionalitas (keterarahan subyek obyek).

Kebenaran fenomenologis dan implikasinya.

Kriteria kebenaran secara fenomenologis bertitik tolak pada peniadaan dualitas subyek-obyek, dan khususnya diterapkan pada ilmu-ilmu sosial dan humaniora, juga didasari oleh sifat-sifat khas obyeknya. Secara fenomenologis diakui adanya hubungan timbal balik antara manusia dengan dunia dan sesamanya sebagai suatu totalitas, sehingga sebagai konsekuensi logisnya terdapat beberapa unsur yang membuat manusia memiliki kesamaan dengan dunia diluarnya, yaitu unsur-unsur biotis dan fisis, serta ada pula unsur yang

membuat manusia mengatasi determinasi dunia material di luarnya, yakni akal dan jiwanya. Dengan demikian suatu usaha untuk mencari kebenaran tentang manusia sebagai obyek ilmu ditentukan juga oleh pemahaman terhadap unsur-unsur yang terkandung di dalam dirinya. Sehingga kualitas kebenaran yang dicapai manusia tidak hanya bergantung pada tingkat pengertian dari pihak subyek terhadap kenyataan, seperti pengertian inderawi, naluriyah atau (sekedar) rasional, tetapi pemahaman akan kenyataan bersama kebenarannya tersebut tergantung dari pilihan taraf yang ingin dipahami. Misalnya pendidikan orang muda dapat dipandang dari sudut dorongan psikologis, segi humanistik atau dari segi religius. Masing-masing segi pemahaman otentik akan tetapi yang satu lebih parsial daripada yang lain (Anton Bakker, 1989). Akan tetapi masing-masing segi pemahaman tersebut merupakan bagian dari struktur pemahaman yang luas, masing-masing menyumbang kepada pemahaman yang lebih penuh.

Pendekatan fenomenologis terhadap kriteria kebenaran berakar pada pemikiran Aristoteles yang mengatakan bahwa pengetahuan yang paling benar dan paling luhur tercapai apabila si pengenal dan apa yang dikenal *identik* satu sama lain dalam pengetahuan yang semakin sempurna. Kemudian dengan melewati Agustinus dan Anselmus, sampai kepada Husserl dan Scheller diformulasikan bahwa kebenaran adalah penyamaan akal dengan realitas dalam bentuk keterarahan tiada henti dan tak terlepas dari indera. Jadi kriteria kebenaran fenomenologis adalah sintetis tiada henti antara "*sudah tahu*" dan "*belum tahu*"; maka kebenaran pengetahuan sesuai tradisi fenomenologis terletak pada "apa yang kusadari sebagai subyek pengetahuan". Hal ini dicatat oleh Verhaak bahwa kebenaran adalah kenyataan adanya (*being*) yang menempatkan diri sampai masuk

akal. Pengalaman tentang kebenaran itu dialami akal si pengenal dalam kesamaan dengan kenyataan obyek yang menampilkan diri kepadanya. Karena kesamaan itu memang dicari dan dikejar namun belum tentu tercapai, maka menurut pengalaman manusia si pengenal, kebenaran itu tanpa hentinya mewujudkan diri sambil ditentukan dari luar tanpa pernah mencapai kesamaan yang sempurna (Verhaak, 1988). Kedudukan kebenaran lalu terletak baik pada apa yang dikenal maupun siapa yang mengenal, atau lebih tepat lagi dalam relasi di antara keduanya.

Lebih khusus lagi, kriteria kebenaran seperti di atas dalam penerapannya di bidang ilmu-ilmu sosial dan humaniora memiliki sifat yang lebih dinamis, sebab sudah menjadi kecenderungan yang khas manusiawi bahwa subyek pengenal berkeinginan untuk maju terus tanpa henti dan tanpa batas. Di samping itu juga didasari bahwa obyek --manusia-- bukanlah semata-mata fakta yang *operable* secara begitu saja demi hasrat untuk memperoleh penjelasan tentang tingkah lakunya, dengan semata-mata berdasarkan ikhtisar hipotesis, hukum dan teori, tetapi obyek adalah juga identik dengan subyek yang terlibat dalam kerja penelitiannya. Hal ini lalu berimplikasi pada jenis cara kerja yang dilakukan, yaitu tidaklah memadai andai-kata fakta-fakta kemanusiaan dijelaskan semata-mata berdasarkan hukum sebab-akibat (*causal explanation*) yang bersifat linier. Fakta-fakta yang terdapat dalam obyek penelitian haruslah diamati pula berdasarkan kemampuan yang ada dalam diri subyek peneliti; sehingga hasil penelitiannya mampu mengungkapkan makna yang terkandung dalam fakta itu. Dengan mengacu pada Heidegger, cara kerja yang dilakukan adalah hermeneutik fenomenologis, seperti oleh Ricoeur dan Levinas; yaitu agar das Sein keluar dari ketersembunyiannya dengan didasari oleh *seins-verstandnis* (pemahaman tentang being)

sebagai hakekat berfikir (Poespoprodjo, 1987). Kriteria kebenaran seperti di atas membawa konsekuensi logis terhadap kualifikasi obyektifitas dan sifat kepastiannya. Kualifikasi obyektifitasnya secara jelas berbeda dengan ilmu-ilmu kealaman, sebab subyek peneliti tidak terletak di luar obyek. Obyektifitas seperti yang dituntut dalam ilmu-ilmu kealaman yang menekankan "pengamatan murni" prasangka, mustahil diterapkan dalam ilmu-ilmu sosial dan humanioran, karena manusia (peneliti) tidak bisa sama sekali meninggalkan dirinya. Demikian juga halnya, sifat kepastian yang eksak dalam ilmu-ilmu kealaman juga tidak bisa diterapkan. Sifat kepastiannya ditentukan berdasarkan taraf evidensi obyek yang dikenal (diteliti). Evidensi dan kepastian dilihat dari sudut kesatuan subyek-obyek dalam gejala pengetahuan manusia pada umumnya. Sebab makin dekat bidang ilmu tertentu pada pengalaman manusia seutuhnya, makin besar kesatuan subyek dan obyek, makin besar pula peranan subyek dalam kesatuan yang dinamis itu. Karena itu sifat kepastian dalam ilmu-ilmu sosial dan humanioran memiliki sifat kesementaraan. Kesementaraan kepastian yang menjadi sifat hasil penelitian sosial-humaniora ini perlu terus disempurnakan seiring dengan cakrawala pengetahuan dalam relasi subyek-obyek yang semakin meluas. Setelah suatu kepastian tercapai dan terumuskan, ketika itu pula sekaligus memiliki potensi (kemungkinan) untuk maju selangkah lagi ke arah kepastian yang lebih "pasti". Setiap langkah merupakan tantangan baru. Disusul oleh perbaikan, pembaharuan, serta pengetahuan tahap-tahap yang sudah ditempuh. Sesungguhnya hal ini justru menunjukkan ciri khas manusiawi pengetahuan manusia, yakni tetap terbuka dan dapat diperbaharui.